



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 April 2020

Halaman: 9

Lebih dari 70.000 Orang Masuk ke DIY

YOGYA. TRIBUN - Lebih dari 70.000 orang diperkirakan masuk ke DIY melalui berbagai gerbang transportasi umum, yakni darat dan udara. Dinas Perhubungan (Dishub) menyebut jumlah tersebut sudah turun dari jumlah rata-rata orang yang

memasuki DIY sebelum wabah Covid-19 merebak.

"Kereta api sudah turun 70 persen biasanya per hari 22.000 orang, itu hanya ngangkut 6.500 orang. Pesawat per hari biasanya 9.000 orang, tapi kemarin yang masuk 2.200 orang. Saya kalikan tujuh karena *average*," ucap Kepala Dinas Perhubungan DIY

Tavip Agus Rayanto di Kematian, Jumat (3/4).

Namun angka yang didapat belum sesuai dengan fakta di lapangan. Tavip mengaku kesulitan mencatat jumlah orang yang masuk ke DIY menggunakan mobil pribadi yang tidak bisa terlacak

● ke halaman 15

Lebih dari 70.000 Orang Masuk

● Sambungan Hal 9

serta bus AKAP yang menurunkan penumpang sebelum masuk ke terminal.

"Data bus ini kritik saya tidak akurat karena tidak semua turun di terminal. Saya ingin menyampaikan ke Pak Dirjen, AKAP yang menjadi kewenangan pusat, jadi kita usulkan ke pemerintah (pusat). Saya (kewenangan) hanya di AKDP dan Transjogja," bebernya.

Tavip menambahkan, dengan tidak adanya larangan mudik yang dicetuskan oleh pemerintah pusat, pihak Pemda DIY pun melakukan berbagai penyesuaian. "Operasi Ketupat nanti kita tidak bicara razia tapi memeriksa *shifting* (kendaraan pribadi) melebihi nggak, bawa manifes nggak dari orang per orang pemudik. Tapi belum jadi *policy* karena masih memberikan masukan ke rapat kerja Presiden," ungkapnya.

Kendaraan pribadi, lanjutnya, ketika regulasinya sudah keluar akan ada pembatasan. Misalkan satu mobil hanya boleh tiga orang yakni satu supir dan dua penumpang. "Itu berarti kita harus operasi di lapangan tapi ini baru bisa menjadi *policy* kalau sudah diputuskan. Tapi ini masih dirapikan karena pemerintah juga mempertimbangkan sisi ekonomi

agar tetap terjadi pertumbuhan dan sisi kesehatan masyarakat. Dua-duanya dianggap penting. Ditunggu lah sehari dua hari ini," urainya.

Tavip juga mengatakan, bahwa upaya pembatasan pemudik yang menggunakan transportasi umum juga dipersulit. "Dipersulit misal angkutan boleh ngangkut penumpang kapasitas 50 persen. Dari segi biaya harus ada konversi biaya lebih mahal. Kalau yang mudik dari zona merah, harus ada surat dokter. Ini untuk memudahkan kita karena jumlah pemudik banyak, kita kewalahan kalau menyediakan tempat karantina," bebernya.

Pemerintah Kota Yogyakarta mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Yogyakarta dengan menyilapkan tempat karantina untuk pemudik.

Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan ada sekitar 550 pemudik yang tercatat memasuki Kota Yogyakarta. Data pemudik tersebut telah dicatat oleh kelurahan dan kecamatan masing-masing.

Dari pemudik tersebut, sebagian besar telah pulang ke rumah keluarga. Dengan demikian tempat karantina ditujukan untuk pemudik yang memang membutuhkan tempat untuk isolasi diri.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjuk dua tempat untuk lokasi karantina.

Satu tempat memiliki kapasitas 30 kamar, sementara tempat yang lain 20 kamar.

"Kita siapkan, saat ini sudah tersedia 50 kamar. Tetapi yang kita tampung yang memang perlu ada penampungan. Yang saat ini pulang itu adalah keluarga dari warga sendiri, sampai saat ini belum ada masalah," katanya.

"Artinya warga menerima, selama sudah diperiksa dan mengisolasi diri. Kalau yang tidak mau isolasi ya segera kita tangani agar mau mengisolasi diri," sambungnya.

Ia menerangkan dengan tidak ada larangan mudik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan antisipasi potensi aliran mudik yang akan datang. Untuk itu pihaknya telah menyiapkan tim skrining di terminal dan stasiun, guna memeriksa kesehatan dan asal pemudik.

Heroe, yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota tersebut meminta agar pemudik sebelum pulang melakukan pemeriksaan di daerah domisili sebelum pulang. Sehingga sebelum memasuki daerah tujuan, paling tidak sudah melalui skrining kesehatan terlebih dahulu.

Meskipun sudah diperiksa, pemudik yang datang harus tetap isolasi diri selama 14 hari dan melakukan pemeriksaan. Karena otomatis pemudik menjadi ODP (Orang dalam Pemantauan), terangnya. (kur/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005